

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manfaat

Masyarakat merupakan konsep dasar dalam ilmu sosial yang merujuk pada sekumpulan individu yang berinteraksi dan hidup bersama dalam jangka waktu tertentu sebagai satu kesatuan sosial. Secara tradisional, definisi ini dijabarkan oleh para ahli sosiologi klasik dan kontemporer yang dikutip dalam karya ilmiah Indonesia. Misalnya, dalam kajian yang dikutip oleh Yulianti (2021), Emile Durkheim menyatakan bahwa masyarakat adalah “kenyataan objektif dari pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya”, sedangkan Paul B. Horton dan Chester L. Hunt menggambarkan masyarakat sebagai “kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut” (Yulianti 2021). Pandangan ini menekankan bahwa hubungan sosial yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi ciri utama keberadaan masyarakat.

Dalam perkembangan kajian sosiologi di Indonesia, peneliti juga menyoroti bagaimana elemen budaya dan interaksi mempengaruhi dinamika masyarakat lokal. Koentjaraningrat, dikutip dalam literatur sosiologi Indonesia, mendefinisikan masyarakat sebagai “kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan terikat oleh rasa identitas yang sama” (Yulianti 2021). Penekanan pada adat dan identitas ini relevan dengan temuan penelitian Basri dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa modernisasi dan pelestarian tradisi merupakan dua kekuatan yang saling berinteraksi dalam pembentukan identitas sosial masyarakat lokal di wilayah Papua, sehingga memperlihatkan bagaimana struktur masyarakat tidak hanya dibentuk oleh interaksi sosial tetapi juga oleh nilai budaya yang diwariskan generasi ke generasi.

Kajian kontemporer di Indonesia juga melihat masyarakat dari perspektif dinamika sosial dan nilai bersama yang mempengaruhi keharmonisan hidup bersama. Aulia, Maftuh, dan Wilodati (2025) menegaskan

bahwa literasi sosial dan pemahaman lintas budaya menjadi faktor penting dalam memperkuat kohesi masyarakat yang multikultural, yang pada gilirannya berimplikasi pada terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Pendekatan ini memperluas pengertian masyarakat dari sekadar interaksi dan keterikatan budaya menjadi suatu sistem sosial yang aktif mengolah perbedaan demi tujuan bersama (Aulia dkk. 2025). Pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa studi masyarakat terus berkembang dengan memasukkan dinamika nilai sosial dan tantangan perubahan zaman dalam analisis ilmiah.

2.2 Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan dipahami sebagai wahana pendidikan yang berorientasi pada pembentukan warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewargaan yang selaras dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan ini tidak berhenti pada penguasaan konsep ketatanegaraan, melainkan diarahkan pada pengembangan karakter dan kesadaran berbangsa yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Penelitian Parawangsa, Dewi, dan Furnamasari menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperan strategis dalam membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, serta mampu menjalankan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai dasar negara (Parawangsa et al., 2021).

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan pergeseran orientasi pembelajaran yang semakin menekankan penguatan kesadaran demokratis, literasi hukum, dan partisipasi warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya diarahkan pada pemahaman normatif mengenai negara dan pemerintahan, tetapi juga pada pembentukan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam menyikapi persoalan sosial dan kebangsaan. Sapriya menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana pendidikan demokrasi yang membekali peserta didik dengan kecakapan kewargaan agar mampu berperan aktif, rasional, dan bertanggung jawab dalam kehidupan publik yang berlandaskan nilai Pancasila (Sapriya, 2022).

Secara konseptual, Pendidikan Kewarganegaraan juga dipandang sebagai bidang kajian multidisipliner yang memadukan ilmu sosial, hukum, politik, dan moral kewargaan. Gustiani, As Shalikhah, dan Maulia menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirancang secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, terutama dalam membentuk warga negara yang cerdas, baik, dan berkepribadian Indonesia. Pendidikan ini berfungsi sebagai fondasi pembinaan karakter kebangsaan sekaligus sarana internalisasi nilai kewargaan agar peserta didik mampu berperan secara konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Gustiani et al., 2023).

2.3 Partisipasi Sosial

Partisipasi sosial merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok masyarakat secara sukarela untuk mengambil bagian dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat formal maupun informal, guna mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan kolektif. Menurut Suharto (2021), partisipasi sosial mencerminkan kesediaan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program pembangunan, hingga evaluasi kebijakan publik yang memengaruhi kehidupan mereka. Konsep ini tidak sekadar mengacu pada kehadiran fisik, melainkan mencakup kontribusi pemikiran, tenaga, maupun sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan perubahan sosial yang lebih baik. Partisipasi sosial menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas demokrasi dan modal sosial suatu komunitas, karena melalui partisipasi tersebut tercipta ruang dialog yang memungkinkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat tersalurkan secara efektif.

Berbagai dimensi partisipasi sosial telah diidentifikasi oleh para ahli untuk memahami bentuk dan tingkat keterlibatan masyarakat. Suryanto dan Herdiana (2022) mengklasifikasikan partisipasi sosial menjadi empat dimensi utama, yakni partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Dimensi perencanaan melibatkan masyarakat sejak tahap awal identifikasi masalah dan penyusunan strategi penyelesaian, sementara partisipasi pelaksanaan mengacu pada keterlibatan langsung dalam aksi nyata

program atau kegiatan yang telah dirancang. Partisipasi pemanfaatan hasil berkaitan dengan hak masyarakat untuk menikmati dan mengakses manfaat dari program pembangunan, sedangkan partisipasi evaluasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap efektivitas program yang telah berjalan. Dimensi-dimensi tersebut saling berkaitan dan idealnya berjalan secara berkesinambungan agar partisipasi sosial dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi sosial masyarakat telah menjadi perhatian dalam berbagai studi empiris. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Nugroho (2023) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, kesadaran politik, kepercayaan terhadap institusi publik, dan ketersediaan akses informasi merupakan determinan signifikan terhadap intensitas partisipasi sosial masyarakat perkotaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan individu tersebut memahami pentingnya keterlibatan dalam urusan publik dan memiliki kepercayaan diri untuk menyuarakan pendapat. Selain itu, Putri dan Setiawan (2024) menegaskan bahwa modal sosial berupa jaringan, norma, dan kepercayaan antarwarga menjadi fondasi krusial yang mendorong atau menghambat partisipasi sosial. Masyarakat yang memiliki kohesivitas tinggi dan rasa saling percaya cenderung lebih aktif terlibat dalam kegiatan kolektif, sementara masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah cenderung apatis dan menarik diri dari aktivitas sosial kemasyarakatan.